



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BOGOR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; Henry Handoyo, S.Si., M.Si.

Jabatan ; Kepala Balai POM di Bogor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama ; Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Jabatan ; Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 03 August 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Bogor



Henry Handoyo, S.Si., M.Si.

Pihak Kedua
Kepala Badan POM



Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BOGOR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 T Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 T Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.86 persen
		02 T Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	31.11 persen
		03 T Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.1 persen
		04 T Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 persen
		05 T Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 persen
		06 T Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95 persen
		07 T Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.88 persen
		08 T Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.73 persen
		09 T Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 persen
		10 T Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.77 persen
		11 T Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.7 persen
		12 T Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	82 persen
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	

		14 T Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	16 persen
		15 T Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66.67 persen
2.	02 T Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 T Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18.8 persen
3.	04 T Meningkatnya efektivitas KIE	01 T Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.13 persen
		04 T Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3 sekolah
		05 T Jumlah desa pangan aman	1 desa
		06 T Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 pasar
4.	05 T Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 T Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27.52 persen
5.	06 T Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 T Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	81.25 persen
6.	07 T Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 T Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	97.92 persen
7.	08 T Layanan Publik UPT yang prima	01 T Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85 indeks
8.	09 T Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 T Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	80.07 persen
		02 T Nilai AKIP UPT BPOM	79.95 persen
		03 T Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 indeks
		04 T Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.75 indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 8,356,899,000 bDelapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 T Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3,097,076,000
2.	WA.6384 T Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	5,259,823,000

Bogor, 03 August 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Bogor



Henry Handoyo, S.Si., M.Si.

Pihak Kedua
Kepala Badan POM



Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D